



Klarifikasi

Prof Hartono

Meskipun sudah menggunakan sistem UKT, biaya hidup untuk KKN belum dimasukkan ke dalam *Cost Structure analysis*. Uang KKN sebesar 1,2 juta rupiah digunakan sebagai biaya hidup, dana pendamping, dan program yang sudah dialokasikan LPPM. Mekanisme KKN sama persis dengan Osce UKDI dimana ada penguji dari luar, penguji dari RS Moewardi, dan penguji internal. Standar pembayaran penguji berbeda-beda (penguji RS Moewardi berbeda dengan penguji dari luar yang menggunakan standar nasional, sedangkan penguji internal tidak dibayar), oleh karenanya ada pembayaran Osce UKDI. KKN tahun 2013 mekanisme yang sama dengan KKN 2012 karena jika biaya hidup KKN dimasukkan ke dalam biaya UKT, sulit di dalam SPJ.

III. KESIMPULAN

- A. Kendala utama dalam pembangunan FK adalah keterbatasan dana yang diperoleh dari biaya UKT. Keterbatasan dana tersebut berujung pada sulitnya regulasi pendelegasian, kegiatan kemahasiswaan lain, mundurnya penyelesaian gedung Pendidikan Dokter yang menyebabkan mundurnya kepindahan prodi Psikologi ke kampus Ketingan. Selain itu sengketa tanah kampus Tirtomoyo juga harus segera diselesaikan agar pembangunan kampus tidak setengah-setengah. Oleh karenanya, pihak Dekanat berusaha membuka kembali jalur swadana agar mampu memperoleh pendapatan yang lebih banyak untuk biaya operasional mahasiswa.
- B. Pelaksanaan KTR akan dipertegas dengan pembentukan satgas yang dipimpin oleh mahasiswa dan pemasangan baliho besar yang menyatakan bahwa kampus FK merupakan kampus tanpa rokok dan memiliki payung hukum SK Dekan.
- C. Pihak dekanat akan melakukan konsolidasi dengan kepada prodi di setiap prodi Fakultas Kedokteran untuk memantau pelaksanaan perkuliahan, termasuk keberjalanan generate system—sistem penjadwalan, kompetensi dosen, dan transparasi nilai.